



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGAHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN INSENTIF KELEMBAGAAN DESA
DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif Kelembagaan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Kelembagaan Desa Di Kabupaten Alor Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

1

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGAHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KELEMBAGAN DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Alor.
5. Camat adalah Pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan



yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan serta Kepala Dusun.

13. Kepala Urusan adalah perangkat desa sebagai unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
15. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Kerukunan warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga pengurusan kemasyarakatan di tingkat kerukunan warga yang dipimpin oleh seorang Ketua dan berada dibawah Desa.
18. Kerukunan tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat kerukunan tetangga yang dipimpin oleh seorang Ketua dan berada dibawah RW.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan tertentu.
21. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
22. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Recana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. insentif.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada :

- a. kepala desa; dan
- b. perangkat desa.

Pasal 4

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain dana desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang berasal dari ASN tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari ASN tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari ASN berhak mendapatkan tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

BAB IV TUNJANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. tunjangan kepala desa;
- b. tunjangan perangkat desa; dan
- c. tujangan BPD.

Pasal 10

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibagi menjadi jenis tunjangan adalah sebagai berikut :

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan kesehatan.

Bagian Kedua Tunjangan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan kepada Kepala Desa yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab.
- (2) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa PNS ditetapkan setiap bulan adalah sebesar Rp.547.990,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. Kepala Desa Non PNS ditetapkan setiap bulan adalah sebesar Rp.547.990,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) potongan jaminan kesehatan sebesar Rp.121.332,- (seratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - 2) tunjangan yang diterima sebesar Rp.426.658,- (empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Sekretaris Desa

Pasal 12

- (1) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diberikan kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab.
- (2) Tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Sekretaris Desa PNS ditetapkan setiap bulan adalah sebesar Rp.454.970 (empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Sekretaris desa Non PNS ditetapkan setiap bulan adalah sebesar Rp.454.970 (empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) potongan jaminan kesehatan sebesar Rp.111.221,- (seratus sebelas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - 2) tunjangan yang diterima sebesar Rp.343.749,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bagian Keempat
Tunjangan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 13

- (1) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diberikan kepada perangkat desa lainnya yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
 - a. Kepala Seksi;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Kepala Dusun.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi sebesar Rp.416.300,- (empat ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) potongan jaminan kesehatan sebesar Rp.101.110,- (seratus satu ribu seratus sepuluh rupiah); dan
 - 2) tunjangan yang diterima sebesar Rp.315.190,- (tiga ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - b. Kepala Urusan sebesar Rp.391.110,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) potongan jaminan kesehatan sebesar Rp.101.110,- (seratus satu ribu seratus sepuluh rupiah); dan
 - 2) tunjangan yang diterima sebesar Rp.290.190,- (dua ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah)
 - c. Kepala Dusun sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan BPD

Pasal 14

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota BPD yang besarannya diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekeratris BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. Anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Penetapan besaran Tunjangan tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Tunjangan tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Selain Tunjangan tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan biaya lainnya berupa Penyediaan Operasional BPD sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB V
INSENTIF KELEMBAGAAN DESA

Pasal 16

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada RW dan RT yang melaksanakan tugas kelembagaan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Insentif RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Insentif RW ditetapkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Insentif RT ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Selain insentif RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada RW dan RT dapat diberikan biaya lainnya berupa Operasional Kelembagaan sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dilakukan oleh BPD, Camat, Bupati dan/atau Penjabat yang berwenang.

- (2) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan penghitungan dan penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Insentif Kelembagaan di Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum dan Penghitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Kelembagaan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 117) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGAHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN INSENTIF KELEMBAGAAN DESA
DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2021**

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah yang komprehensif, sinergi, tepat sasaran dengan berbasis desa menjadi latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara strategis mengatur dan mendukung dinamika pemerintahan dan pembangunan di desa.

Bahwa berbagai aspek menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah desa sebagai institusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa yang darinya pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat terus dikembangkan.

Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai stakeholder pembangunan desa mesti mendapat dukungan baik sarana prasarana juga peningkatan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menyadari hal ini, Pemerintah Kabupaten Alor memandang perlu dan penting membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Kelembagaan Di Desa. Regulasi ini menjadi dasar hukum sekaligus rujukan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan guna mendukung kinerja yang optimal dari Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

1

- Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 168

b

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
 NOMOR 60 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 DESEMBER 2020

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RW DAN RT
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Personil | | | | | | | | | | | | | JLH |
|--------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|----|-----|-----|
| | | | | | Kepala Desa Non PNS | Kepala Desa PNS | Sekertaris Non PNS | Sekertaris PNS | Kepala Seksi | Kaur Desa | Kepala Dusun | Ketua BPD | wakil BPD | Sek BPD | Anggota BPD | RW | RT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | NTT | ALOR | Teluk Mutiara | Lendola | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 36 |
| 2 | NTT | ALOR | Teluk Mutiara | Fanating | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 30 |
| 3 | NTT | ALOR | Teluk Mutiara | Motongbang | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 4 | NTT | ALOR | Teluk Mutiara | Air Kenari | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 30 |
| 5 | NTT | ALOR | Teluk Mutiara | Adang Buom | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 6 | NTT | ALOR | Teluk Mutiara | Teluk Kenari | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| TOTAL | | | | | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 32 | 26 | 55 | 179 |
| 7 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Alor Kecil | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 36 |
| 8 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Alor Besar | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 33 |
| 9 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Ampera | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Dulolong | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 33 |
| 11 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Aimoli | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 12 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Alila | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 13 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Otvai | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 34 |
| 14 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Ternate | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 15 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Ternate Selatan | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 16 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Alila Selatan | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 30 |
| 17 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Pulau Buaya | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 18 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Hulnani | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 19 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | O'amate | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 20 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Alaang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 21 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Lefokisu | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 22 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Bampalola | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 23 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Lewalu | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 24 | NTT | ALOR | Alor Barat Laut | Dulolong Barat | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| TOTAL | | | | | 18 | 0 | 16 | 2 | 36 | 36 | 40 | 18 | 18 | 18 | 70 | 79 | 158 | 509 |
| 25 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Probur | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 37 |
| 26 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Tribur | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 36 |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
 NOMOR 60 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 DESEMBER 2020

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RW DAN RT
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Personil | | | | | | | | | | | | | JLH |
|--------------|----------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|----|-----|-----|
| | | | | | Kepala Desa Non PNS | Kepala Desa PNS | Sekertaris Non PNS | Sekertaris PNS | Kepala Seksi | Kaur Desa | Kepala Dusun | Ketua BPD | wakil BPD | Sek BPD | Anggota BPD | RW | RT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 27 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Wakapsir | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 28 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Morba | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 29 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Pintu Mas | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | 43 |
| 30 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Wolwal | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 31 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Halerman | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 32 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Kafelulang | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 26 |
| 33 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Moramam | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 34 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Paielang | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 35 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Wolwal Barat | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 36 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Wolwal Tengah | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 37 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Wolwal Selatan | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 38 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Probur Utara | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 39 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Manatang | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 40 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Orgen | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 |
| 41 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Wakapsir Timur | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 42 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Kuifana | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 43 | NTT | ALOR | Alor Barat Daya | Margeta | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| TOTAL | | | | | 19 | 0 | 14 | 5 | 38 | 38 | 42 | 19 | 19 | 19 | 78 | 78 | 159 | 528 |
| 44 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Kelaisi Barat | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 45 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Sidabui | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 39 |
| 46 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Padang Alang | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 34 |
| 47 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Kuneman | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 29 |
| 48 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Silaipui | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 33 |
| 49 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Kelaisi Tengah | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 50 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Kiraman | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 27 |
| 51 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Maikang | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 52 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Malaipea | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 53 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Tamanapui | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 54 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Lella | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
 NOMOR 60 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 DESEMBER 2020

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RW DAN RT
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Personil | | | | | | | | | | | | | JLH |
|--------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|----|-----|-----|
| | | | | | Kepala Desa Non PNS | Kepala Desa PNS | Sekertaris Non PNS | Sekertaris PNS | Kepala Seksi | Kaur Desa | Kepala Dusun | Ketua BPD | wakil BPD | Sek BPD | Anggota BPD | RW | RT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 55 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Manmas | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 56 | NTT | ALOR | Alor Selatan | Subo | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| TOTAL | | | | | 13 | 0 | 11 | 2 | 26 | 26 | 35 | 13 | 13 | 13 | 40 | 60 | 116 | 368 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | NTT | ALOR | Alor Timur | Tanglapui | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 58 | NTT | ALOR | Alor Timur | Kolana Selatan | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 36 |
| 59 | NTT | ALOR | Alor Timur | Padang Panjang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 60 | NTT | ALOR | Alor Timur | Maritaing | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 32 |
| 61 | NTT | ALOR | Alor Timur | Elok | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 62 | NTT | ALOR | Alor Timur | Tanglapui Timur | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 63 | NTT | ALOR | Alor Timur | Mausamang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 26 |
| 64 | NTT | ALOR | Alor Timur | Belemana | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 65 | NTT | ALOR | Alor Timur | Maukuru | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| TOTAL | | | | | 9 | 0 | 7 | 2 | 18 | 18 | 19 | 9 | 9 | 9 | 30 | 40 | 78 | 248 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | NTT | ALOR | Pantar | Pandai | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 67 | NTT | ALOR | Pantar | Bandar | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 68 | NTT | ALOR | Pantar | Baolang | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 69 | NTT | ALOR | Pantar | Munaseli | 1 | | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 70 | NTT | ALOR | Pantar | Helangdohi | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 71 | NTT | ALOR | Pantar | Wailawar | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 72 | NTT | ALOR | Pantar | Bana | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 73 | NTT | ALOR | Pantar | Bouweli | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 74 | NTT | ALOR | Pantar | Bukit Mas | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 75 | NTT | ALOR | Pantar | Madar | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| TOTAL | | | | | 10 | 0 | 3 | 7 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 28 | 40 | 80 | 258 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Lembur Barat | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 77 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Lembur Tengah | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 30 |
| 78 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Likuwatang | 0 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
 NOMOR 60 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 DESEMBER 2020

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RW DAN RT
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Personil | | | | | | | | | | | | | JLH |
|--------------|----------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|----|-----|-----|
| | | | | | Kepala Desa Non PNS | Kepala Desa PNS | Sekertaris Non PNS | Sekertaris PNS | Kepala Seksi | Kaur Desa | Kepala Dusun | Ketua BPD | wakil BPD | Sek BPD | Anggota BPD | RW | RT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 79 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Fungafeng | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 80 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Fuisama | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 81 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Nurbenlelang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 82 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Kafakbekta | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 83 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Manetwati | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 84 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Lakwati | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 85 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Dapitau | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 86 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Alim Mebung | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 87 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Petleng | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 32 |
| 88 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Welai Selatan | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 89 | NTT | ALOR | Alor Tengah Utara | Tominuku | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| TOTAL | | | | | 12 | 2 | 14 | 0 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 44 | 57 | 117 | 372 |
| 90 | NTT | ALOR | Alor Timur Laut | Pido | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 30 |
| 91 | NTT | ALOR | Alor Timur Laut | Waisika | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | 46 |
| 92 | NTT | ALOR | Alor Timur Laut | Kamot | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 29 |
| 93 | NTT | ALOR | Alor Timur Laut | Taramana | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 94 | NTT | ALOR | Alor Timur Laut | Nailang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 39 |
| 95 | NTT | ALOR | Alor Timur Laut | Lippang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 96 | NTT | ALOR | Alor Timur Laut | Kenarimbala | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 29 |
| 97 | NTT | ALOR | Alor Timur Laut | Air Mancur | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| TOTAL | | | | | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 18 | 8 | 8 | 8 | 30 | 42 | 88 | 250 |
| 98 | NTT | ALOR | Pantar Barat | Baraler | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 99 | NTT | ALOR | Pantar Barat | Kalondama | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 100 | NTT | ALOR | Pantar Barat | Leer | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 101 | NTT | ALOR | Pantar Barat | Baranusa | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 102 | NTT | ALOR | Pantar Barat | Blangmerang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 103 | NTT | ALOR | Pantar Barat | Illu | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 104 | NTT | ALOR | Pantar Barat | Piringsina | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
 NOMOR 60 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 DESEMBER 2020

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RW DAN RT
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Personil | | | | | | | | | | | | | JLH |
|-----|----------|-----------|------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|----|----|-----|
| | | | | | Kepala Desa Non PNS | Kepala Desa PNS | Sekertaris Non PNS | Sekertaris PNS | Kepala Seksi | Kaur Desa | Kepala Dusun | Ketua BPD | wakil BPD | Sek BPD | Anggota BPD | RW | RT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | TOTAL | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 32 | 28 | 56 | 193 |
| 105 | NTT | ALOR | Kabola | Kopidil | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 106 | NTT | ALOR | Kabola | Pante Deere | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 107 | NTT | ALOR | Kabola | Lawahing | 0 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 36 |
| 108 | NTT | ALOR | Kabola | Alila Timur | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| | | | | TOTAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | 36 | 115 |
| 109 | NTT | ALOR | Pulau Pura | Maru | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 110 | NTT | ALOR | Pulau Pura | Pura Utara | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 24 |
| 111 | NTT | ALOR | Pulau Pura | Pura Selatan | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 31 |
| 112 | NTT | ALOR | Pulau Pura | Pura Timur | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 113 | NTT | ALOR | Pulau Pura | Pura Barat | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| | | | | TOTAL | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | 20 | 41 | 134 |
| 114 | NTT | ALOR | Mataru | Mataru Selatan | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 115 | NTT | ALOR | Mataru | Mataru Utara | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 30 |
| 116 | NTT | ALOR | Mataru | Lakatuli | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 117 | NTT | ALOR | Mataru | Mataru Timur | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 118 | NTT | ALOR | Mataru | Kamaifui | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 119 | NTT | ALOR | Mataru | Mataru Barat | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 120 | NTT | ALOR | Mataru | Taman Mataru | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| | | | | TOTAL | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 24 | 29 | 58 | 188 |
| 121 | NTT | ALOR | Pureman | Langkuru | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 122 | NTT | ALOR | Pureman | Purnama | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 123 | NTT | ALOR | Pureman | Kailesa | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 124 | NTT | ALOR | Pureman | Langkuru Utara | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| | | | | TOTAL | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 32 | 108 |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
 NOMOR 60 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 DESEMBER 2020

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RW DAN RT
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Personil | | | | | | | | | | | | | JLH |
|--------------|----------|-----------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|----|----|-----|
| | | | | | Kepala Desa Non PNS | Kepala Desa PNS | Sekertaris Non PNS | Sekertaris PNS | Kepala Seksi | Kaur Desa | Kepala Dusun | Ketua BPD | wakil BPD | Sek BPD | Anggota BPD | RW | RT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 125 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Nule | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 126 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Kaleb | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 127 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Batu | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 30 |
| 128 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Kaera | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 129 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Mawar | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 130 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Merdeka | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 131 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Ombay | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 132 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Lekom | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 133 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Bunga Bali | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 134 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Treweng | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 135 | NTT | ALOR | Pantar Timur | Lalafang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| TOTAL | | | | | 10 | 1 | 11 | | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 48 | 44 | 89 | 302 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | NTT | ALOR | Lembur | Lembur Timur | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 137 | NTT | ALOR | Lembur | Luba | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 138 | NTT | ALOR | Lembur | Talawai | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 139 | NTT | ALOR | Lembur | Tulleng | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 140 | NTT | ALOR | Lembur | Waimi | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 141 | NTT | ALOR | Lembur | Tasi | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| TOTAL | | | | | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | 48 | 160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Tude | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 34 |
| 143 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Mauta | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 35 |
| 144 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Muriabang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 145 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Tubbe | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 146 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Tamakh | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 147 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Bagang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 148 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Toang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 149 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Eka Jaya | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 150 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Aramaba | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 36 |

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 60 TAHUN 2020
TANGGAL 10 DESEMBER 2020

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RW DAN RT
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | Propinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Personil | | | | | | | | | | | | | JLH |
|-----|----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | Kepala Desa Non PNS | Kepala Desa PNS | Sekertaris Non PNS | Sekertaris Seksi | Kepala Desa | Kepala Dusun | Ketua BPD | wakil BPD | Sek BPD | Anggota BPD | RW | RT | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 151 | NTT | ALOR | Pantar Tengah | Delaki | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| | | | | TOTAL | 10 | 0 | 8 | 2 | 20 | 20 | 22 | 10 | 10 | 10 | 36 | 46 | 92 | 286 |
| 152 | NTT | ALOR | Pantar Barat Laut | Kayang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 153 | NTT | ALOR | Pantar Barat Laut | Marisa | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 29 |
| 154 | NTT | ALOR | Pantar Barat Laut | Lamma | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 155 | NTT | ALOR | Pantar Barat Laut | Allumang | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 156 | NTT | ALOR | Pantar Barat Laut | Beangonong | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 27 |
| 157 | NTT | ALOR | Pantar Barat Laut | Kalondama Barat | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| 158 | NTT | ALOR | Pantar Barat Laut | Kalondama Tengah | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 |
| | | | | TOTAL | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 22 | 28 | 56 | 183 |
| | | | | JUMLAH | 154 | 4 | 132 | 26 | 316 | 316 | 339 | 158 | 158 | 158 | 586 | 675 | 1359 | 4381 |

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 60 TAHUN 2020
TANGGAL 10 DESEMBER 2020

PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RW DAN RT PER BULAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| No | Kecamatan | Desa | Penghasilan Tetap | | | | | | | Tunjangan | | | | | | | Insentif | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Kepala Desa Non PNS | Kepala Desa PNS | Sekretaris Non PNS | Sekdes PNS | Kepala seksei | Kepala Urusan | Kepala Dusun | Kepala Non Desa | Kepala Desa PNS | Sekdes Non PNS | Sekdes PNS | Kepala Seksei | Kepala Urusan | Kepala Dusun | Ketua BPD | Wakil BPD | Sekretaris BPD | Anggota BPD | Ketua RW | Ketua RT |
| 3 | Pantar Barat Laut | Lamma | 2,426,640 | | 2,224,420 | | 2,022,200 | 2,022,200 | 2,022,200 | 426,658 | | 343,749 | | 315,190 | 290,190 | - | 800,000 | 550,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 |
| 4 | Pantar Barat Laut | Allumang | 2,426,640 | | 2,224,420 | | 2,022,200 | 2,022,200 | 2,022,200 | 426,658 | | 343,749 | | 315,190 | 290,190 | - | 800,000 | 550,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 |
| 5 | Pantar Barat Laut | Beargonong | 2,426,640 | | 2,224,420 | | 2,022,200 | 2,022,200 | 2,022,200 | 426,658 | | 343,749 | | 315,190 | 290,190 | - | 800,000 | 550,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 |
| 6 | Pantar Barat Laut | Kalondama Barat | 2,426,640 | | 2,224,420 | | 2,022,200 | 2,022,200 | 2,022,200 | 426,658 | | 343,749 | | 315,190 | 290,190 | - | 800,000 | 550,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 |
| 7 | Pantar Barat Laut | Kalondama Tengah | 2,426,640 | | 2,224,420 | | 2,022,200 | 2,022,200 | 2,022,200 | 426,658 | | 343,749 | | 315,190 | 290,190 | - | 800,000 | 550,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 |
| TOTAL | | | 16,986,480 | | 15,570,940 | | 14,155,400 | 14,155,400 | 14,155,400 | 2,966,606 | | 2,406,243 | | 2,206,330 | 2,031,330 | | 5,600,000 | 3,850,000 | 3,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,450,000 |
| JUMLAH | | | 371,275,920 | | 323,623,440 | | 317,485,400 | 317,485,400 | 317,485,400 | 66,253,322 | 2,191,960 | 45,031,119 | 11,829,220 | 49,484,830 | 45,359,830 | | 125,600,000 | 86,350,000 | 78,500,000 | 62,800,000 | 62,800,000 | 54,950,000 |



BUPATI ALOR,
AMON DJOBO

